



# TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN DALAM E GOVERNMENT KOTA BANDUNG

Dini Arwati<sup>1</sup>, Dini Verдания Latif<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi / Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama Bandung, <sup>2</sup>Program Studi Akuntansi / Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama Bandung

The Indonesian government is currently trying to implement e government in every government organization. E government is a system based on technology and information that aims to improve the functions of public administration and relations with the community. With the e-government, it is expected to create information transparency, especially financial information. A transparent system can prevent misuse of the budget, which has a high level of corruption. The survey results at the global level indicate that corruption cases have caused mistrust of the government. This study aims to determine the level of public trust in financial transparency in e government. The research method used was a descriptive method by distributing questionnaires to 200 Bandung residents. The results of the study indicate that financial transparency in e government has an effect on public trust.

**Keywords:** Public Trust, Financial Transparency, E Government

Pemerintah Indonesia pada saat sekarang berusaha untuk mengimplementasikan e government di setiap organisasi pemerintah. E government adalah suatu sistem yang berbasis teknologi dan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi administrasi publik dan hubungan dengan masyarakat. Dengan adanya e government diharapkan terciptanya transparansi informasi, khususnya informasi keuangan. Sistem yang transparan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, yang berdampak tingginya tingkat korupsi. Hasil survey di tingkat global menunjukkan adanya kasus korupsi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi keuangan dalam e government. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptif dengan menyebarkan kuesiner kepada 200 orang warga Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi keuangan dalam e government berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.

**Keywords:** Public Trust, Financial Transparency, E Government

## PENDAHULUAN

Bank Dunia menyatakan bahwa korupsi merupakan tantangan utama untuk mencapai dua tujuan utama yaitu mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030 dan meningkatkan kesejahteraan

### OPEN ACCESS

ISSN 2528-4649 (online)

ISSN 2338-4409 (print)

**\*Correspondence:**

Dini Verдания Latif  
[dini.verдания@widyatama.ac.id](mailto:dini.verдания@widyatama.ac.id)

**Received:** 10 Juni 2019

**Accepted:** 10 Juni 2019

**Published:** 4 September 2019

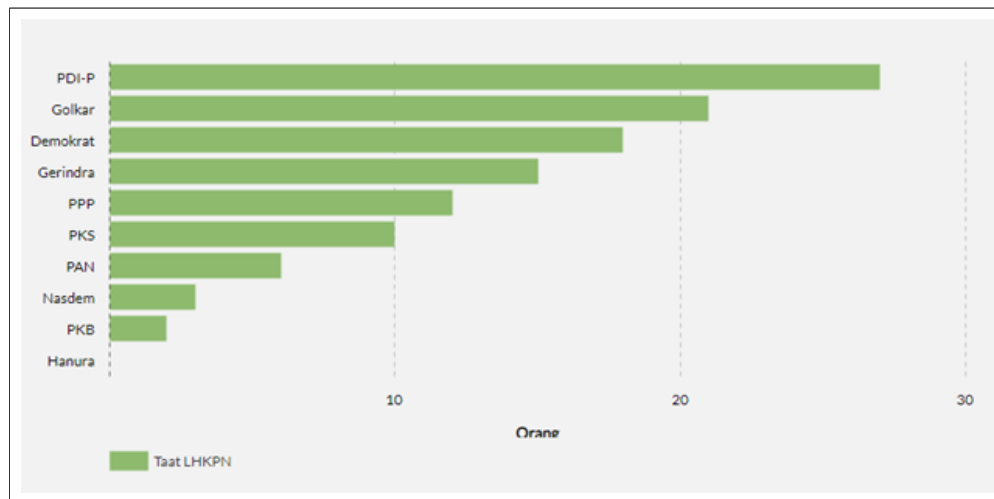
**Citation:**

DA and DVL (2019) TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN DALAM E GOVERNMENT KOTA BANDUNG. *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan*. 5:2. doi: <http://doi.org/10.21070JBMP.V512>

aan bersama bagi 40 persen orang termiskin di negara berkembang (The World Bank, 2018). Menurut Transparency International Indonesia (TII), korupsi di Indonesia tergolong parah. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia jika di bandingkan Negara lainnya berada pada posisi 89 dari 180 negara. Kedudukan ini setara dengan negara lain seperti Bosnia-Herzegovina, Sri Lanka, dan Swaziland yang juga memiliki tingkat korupsi yang tinggi. TII berpendapat tingkat IPK yang rendah karena adanya komitmen yang rendah dari para pejabat. Hal ini tercermion dari rendahnya jumlah pejabat yang menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.(KPK). Grafik Kepatuhan LHKPN berdasarkan fraksi dapat di lihat pada Grafik 1. Kepatuhan para pejabat baik di tingkat eksekutif, legislative maupun yudikatif seras pejabat BUMN/BUMD dalam penyampaian LHKPN baru mencapai 63,78%. Komitement terendah diperlihatkan pejabat legislative, untuk DPR baru disampaikan sebanyak 21,46% dan DPRD sebanyak 28,71% (Wijaya, 2019).

Korupsi banyak di lakukan oleh pejabat yang di pilih oleh rakyat, seperti anggota DPR, DPRD maupun kepala daerah. Para pejabat ini melakukan abuse of power untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri melalui penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa dan pemberian izin [2]. Sejak berdiri pada tahun 2002, KPK telah memproses wakil rakyat yang melakukan korupsi. Jumlah keseluruhan mencapai 220 orang dengan perincian 74 orang merupakan anggota DPR dan 146 orang adalah anggota DPRD (Irawan, 2018)

Korupsi menyebabkan terhambatnya investasi, yang berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Berbeda dengan negara yang tingkat korupsinya tinggi, negara-negara yang mampu menghadapi korupsi dapat menggunakan sumber daya manusia dan keuangannya secara lebih efisien, sehingga menarik lebih banyak investasi, yang berdampak pada tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu korupsi memiliki dampak pendapatan yang tidak proporsional bagi orang miskin, meningkatkan biaya dan mengurangi akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Korupsi mengakibatkan hak masyarakat terampas, yang memicu munculnya ketidakpercayaan kepada pemerintah (The World Bank, 2018)



Graph 1: Kepatuhan LHKPN berdasarkan fraksi , 2018

Agar dapat mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, pemerintah Indonesia terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka. Pemerintah telah menerbitkan regulasi yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus bekerja secara transparan (Simbolon, 2019). Upaya penurunan korupsi yang sukses sering dipimpin oleh 'koalisi yang peduli' . Keberhasilan mengatasi korupsi memerlukan perhatian bersama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. disertai penggunaan teknologi canggih terbaru, yaitu e government (The World Bank, 2018). Dengan adanya E gov-

ernment diharapkan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan secara transparan, khususnya informasi keuangannya, sehingga dapat mencegah perilaku korupsi

Berdasarkan uraian di atas bahwa terjadinya kasus korupsi dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka pemerintah berusaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan melalui e government. Dengan adanya informasi yang transparan maka masyarakat dapat lebih peduli terhadap jalannya pemerintahan. Keterlibatan masyarakat diharapkan mampu menurunkan tingkat korupsi dan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi informasi melalui e government dan pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam penyempurnaan e government, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat ditingkatkan

## LANDASAN TEORI

### Kepercayaan Masyarakat

#### Definisi Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan di definisikan sebagai penilaian kolektif dari satu kelompok atas kelompok lainnya bahwa kelompok tersebut akan bertindak jujur, dapat memenuhi komitmennya dan tidak akan merugikan kelompok lainnya. Definisi ini menegaskan bahwa seorang mitra tidak akan merugikan dan bertentangan dengan harapan mitranya (Park and Blenkinsopp, 2011).

Kepercayaan pada lembaga publik dapat di tingkatkan melalui standard, hukum dan peraturan yang berkaitan dengan ketentuan layanan dan informasi. Lembaga publik dapat meningkatkan kepercayaan institusinya dengan mengadopsi teknologi baru seperti situs web pemerintah. Dengan situs web ini diharapkan penyampaian informasi dan layanan publik menjadi lebih transparan dan mengurangi penyalahgunaan jabatan. Kepercayaan pada pemerintah atau layanan publik biasanya diukur berdasarkan penilaian subyektif warga berdasarkan pengalaman mereka. Kepercayaan warga akan muncul ketika pemerintah atau layanan publik yang di terima masyarakat mencerminkan kinerja yang kompeten, dapat diandalkan, jujur, dan terpenuhinya kebutuhan mereka (Park and Blenkinsopp, 2011).

#### Korupsi di Pemerintahan dan Kepercayaan Masyarakat

Korupsi merupakan perilaku yang melanggar etika dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Korupsi mengandung tiga elemen : pelanggaran hukum, penyalahgunaan jabatan dan penerimaan hadiah atau keuntungan pribadi. Korupsi dapat melemahkan kinerja layanan publik dan menyebabkan berkurangnya kepuasan masyarakat kepada pemerintah, sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan berbagai kebijakan dan program publik yang bergantung pada respons perilaku dari publik dan sangat bergantung pada kerja sama dan kepatuhan warga negara Selain itu kepercayaan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan pula pada investor dan konsumen, sehingga akan mendorong kegiatan ekonomi utama (OECD, 2019).

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat di tingkatkan dengan mengimplementasikan e government. Implementasi e government mengacu kepada transparansi informasi. Tanpa adanya transparansi informasi, maka akan terjadi asimetri informasi antara pihak pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna informasi. Asimetri informasi ini lah yang memungkinkan pemerintah melakukan tindak pidana korupsi, karena pemerintah dapat mengeksploitasi kekuatan yang terdapat pada dirinya.

### E-Government

E-government merupakan penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah secara online. E government adalah penggunaan teknologi informasi dengan tujuan untuk memberikan layanan secara elektronik bagi warga masyarakat, bisnis, dan instansi pemerintah lainnya. Dengan

adanya e government ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga pemerintah.

Prinsip yang mendasari e government adalah kerangka kerja kelembagaan yang efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja internal sektor publik dengan mengurangi biaya dan waktu transaksi. E government dapat lebih mengintegrasikan aliran kerja dan proses sehingga dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif. E government dapat memenuhi tuntutan dari warga masyarakat akan informasi yang transparan, sehingga warga masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah (United Nation, 2019).

## Transparansi Keuangan

Transparansi keuangan di bidang pemerintahan pada intinya berkaitan memberikan informasi yang terbuka, artinya setiap warga negara dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan yang diperlukannya, dapat memantau kinerja pemerintah dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Tingkat transparansi informasi keuangan ditentukan oleh kuantitas dan kualitas informasi antara pemerintah dan warga masyarakat, dan peningkatan sistem penyebaran informasi. Dengan adanya transparansi diharapkan pertukaran informasi keuangan dapat menghilangkan hambatan dalam asimetri informasi, sehingga tidak ada lagi informasi yang dapat disembunyikan.

Menurut Grimmelikhuijsen dan Welch (2012), transparansi pemerintah berarti masyarakat dapat mengetahui proses dan aktivitas apa yang dilakukan pemerintah. Terdapat 3 komponen yang berkaitan dengan transparansi informasi keuangan, yaitu transparansi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anggaran, transparansi konten kebijakan dalam penggunaan anggaran dan transparansi hasil penggunaan anggaran berdasarkan kebijakan tersebut. Transparansi dalam pengambilan keputusan menggambarkan langkah-langkah bagaimana suatu keputusan diambil, mengapa keputusan itu diambil dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap keputusan tersebut. Transparansi kebijakan mengacu pada bagaimana dari implementasi suatu kebijakan dalam menyelesaikan masalah warga. Transparansi hasil kebijakan terutama berkaitan dengan efek dari penerapan kebijakan yang telah dijalankan.

## Transparansi Keuangan Pada E Government dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Transparansi di bidang pemerintahan pada intinya berkaitan memberikan informasi yang terbuka, artinya setiap warga negara dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukannya, dapat memantau kinerja pemerintah dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah

Penelitian yang dilakukan Tolbert dan Mossberger (2006) menunjukkan bahwa "e-government dapat meningkatkan kepercayaan berbasis proses yaitu dengan cara meningkatkan interaksi pemerintah dengan warga masyarakat, selain itu warga dapat melakukan evaluasi terhadap pemerintahan. Mereka melakukan penelitian dengan Mereka menggunakan Pew Internet dan American Life Project dengan sampel sebanyak 815 orang yang menggunakan situs web pemerintah. Negara dengan tingkat korupsi yang rendah menunjukkan korelasi yang tinggi antara tingkat e government dengan tingkat kepercayaan pemerintah.

Hasil penelitian dari Moon (2003) menunjukkan kepercayaan kepada publik terus melemah karena adanya faktor pemborosan, ketidakefektifan dan kurangnya pemahaman terhadap kebijakan. Moon berpendapat bahwa untuk membantu memulihkan kepercayaan publik adalah dengan cara transparansi informasi sehingga warga masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dengan adanya transparansi informasi diharapkan tercapainya efisiensi biaya, tercapainya tujuan yang diprogramkan dan pemahaman warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa E-government memberikan solusi untuk meningkatkan kepercayaan melalui transparansi informasi. Dengan adanya transparansi informasi dapat meningkatkan komunikasi warga masyarakat dengan pemerintah sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan melakukan pengawasan

terhadap aktivitas pemerintah

## METODE PENELITIAN

### Model Penelitian

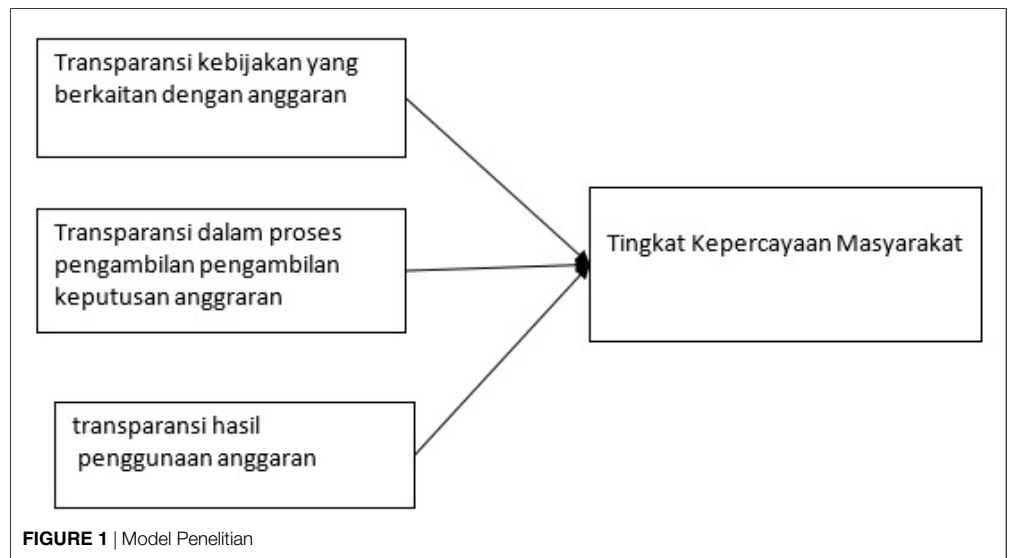
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi informasi keuangan e government kota Bandung terhadap kepercayaan warga masyarakat kepada pemerintah. Indikator transparansi keuangan berdasarkan penelitian dari Grimmelikhuisen dan Welch (2012) meliputi :

- transparansi kebijakan yang berkaitan dengan anggaran
- transparansi dalam proses pengambilan keputusan anggaran
- transparansi hasil penggunaan anggaran

Sedangkan indikator untuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah didasarkan atas teori dari Park and Blenkinsopp (2011). Indikator kepercayaan warga masyarakat meliputi:

- Kinerja pemerintah dilakukan oleh petugas yang kompeten
- Kinerja pemerintah dapat diandalkan
- Kinerja pemerintah dihasilkan melalui proses yang jujur
- Kinerja pemerintah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat

Model penelitian ditunjukkan pada gambar 1. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan anggaran.



### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menentukan seberapa besar pengaruh transparansi keuangan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner baik secara offline maupun online penyebaran kuesioner dilakukan pada Bulan Mei- Maret 2019.

### Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah warga masyarakat kota Bandung. Dalam penelitian ini sampel dibatasi karena masih kurangnya pemahaman masyarakat kota Bandung terhadap e government. Sampel meliputi 200 warga kota Bandung yang paham akan implementasi e government.

Sampel meliputi warga masyarakat yang pernah menggunakan e government untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

### Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah dengan menggunakan kuesioner. Untuk kuesioner mengenai transparansi keuangan e government meliputi 10 pernyataan. Setiap pernyataan di berikan skor 1 samapai dengan 5. Kriteria skor :

1. Skor 1 = jika responden sangat tidak setuju dengan pernyataan
2. Skor 2 = jika responden tidak setuju dengan pernyataan
3. Skor 3 = jika responden ragu-ragu dengan pernyataan
4. Skor 4 = jika responden setuju dengan pernyataan
5. Skor 5 = jika responden sangat setuju dengan pernyataan

Untuk kuesioner mengenai tingkat kepercayaan masyarakat meliputi 5 pernyataan. Setiap pernyataan di berikan skor 1 samapai dengan 5. Kriteria skor :

1. Skor 1 = jika responden sangat tidak percaya dengan pernyataan
2. Skor 2 = jika responden tidak percaya dengan pernyataan
3. Skor 3 = jika responden ragu-ragu dengan pernyataan
4. Skor 4 = jika responden percaya dengan pernyataan
5. Skor 5 = jika responden sangat percaya dengan pernyataan

### Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisi data mengguanakan regresi multiple dengan persamaan :

$$Y = a + bX_1 + cX_2 + dX_3 + e$$

Y = Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

X1 = Transparansi kebijakan yang berkaitan dengan anggaran

X2 = Transparansi dalam proses pengambilan keputusan anggaran

X3 = Transparansi hasil penggunaan anggaran

Karena data merupakan data ordinal maka data tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi data interval dengan menggunakan metode successive interval. Pengubahan skala data menjadi interval dimaksudkan agar dapat dianalisis dengan menggunakan regresi multipel. Regresi multiple juga mensyaratkan asumsi linieritas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif ini berdasarkan jawaban kuesioner yang telah diuji validitas dan realibilitasnya. Dari 200 kuesioner yang disebarkan, hanya 187 responden yang memberikan jawaban secara lengkap

Statistik Deskriptif Transparansi Informasi Keuangan disajikan dalam table 1. Hasil jawaban kuesioner menunjukkan bahwa skor rata rata di atas 3, sehingga dapat disimpulkan pemerintah telah transparan dalam memberikan informasi keuangan berdasarkan persepsi warga masyarakat.

Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

R = Ragu-ragu

S = Setuju

SS = Sangat setuju

**TABLE 1** | Statistik Deskriptif Transparansi Informasi Keuangan

Pernyataan	Jawaban Responden (%)					Skor rata-rata
	STS	TS	R	P	SP	
e government memberikan transparansi dalam hal peraturan pemerintah berkaitan dengan anggaran	2.4	7.1	14.3	48.8	27.4	3.9
e government memberikan transparansi dalam hal kebijakan penggunaan sumber daya dalam pemerintahan	5.9	8.2	29.4	36.5	20	3.6
e government memberikan transparansi kebijakan mengenai pertanggung jawaban pemerintah	4.8	10.7	16,7	40.5	27.4	3.8
e government memberikan fasilitas informasi mengenai kebijakan program kerja pemerintah dan pengawasannya	3.9	11.7	18.2	40.3	26	3.7
Transparansi dalam proses pengambilan keputusan anggaran						
e government memberikan transparansi dalam hal proses penyusunan anggaran pemerintah	4.7	4.7	23.5	41.2	25.9	3.8
e government memberikan transparansi dalam hal anggaran penerimaan pemerintah	3.5	4.9	20	45.9	21.2	3.6
e government memberikan transparansi dalam hal pengeluaran pemerintah	5.9	8.2	29.4	36.5	20	3.6
transparansi hasil penggunaan anggaran						
e government memberikan transparansi mengenai hasil audit kinerja pemerintah	6,3	8,9	24.1	35.4	25.3	3.6
e government memberikan transparansi mengenai kinerja pemerintah secara akredibel	3,7	13.4	18.3	42.7	22	3.6
e government memberikan transparansi mengenai kinerja pemerintah secara tepatwaktu	6	7.2	20.5	45,8	20.5	3.7

Statistik Deskriptif tingkat kepercayaan masyarakat di sajikan dalam table 2. Hasil jawaban kuesioner menunjukkan bahwa skor rata rata di atas 3, sehingga dapat disimpulkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah tinggi.

**TABLE 2** | Statistik Deskriptif tingkat kepercayaan masyarakat

Pernyataan	Jawaban Responsen (%)					Skor Rata-rata
	STP	TP	R	P	SP	
Pemerintah memiliki pegawai yang kompeten	3.7	13,4	18,3	42.7	22	3.6
Pemerintah memiliki produktivitas kerja yang tinggi	1,3	2.6	5.5	36.4	53.2	4.34
Tidak ditemukan adanya kecurangan dalam pengelolaan asset yang dimiliki oleh pemerintah	4.7	8.2	28.2	40	18.8	3.6
Pemerintah memberikan pelayanan publik yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	3.5	8.2	14.1	45.9	28.2	3.8

Keterangan :

STP = Sangat Tidak Percaya

TP = Tidak Percaya

R = Ragu-ragu

P = Percaya

SP = Sangat Percaya

## Hasil Analisis Data

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh transparasi keuangan dalam e government terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, maka di lakukan analisi regresi multiple. Berdasarkan hasil uji F dapat di simpulkan bahwa terdapat pengaruh transparasi keuangan dalam e government tingkat kepercayaan masyarakat, pengaruhnya adalah sebesar nilai R Square yaitu sebesar 74%. Hasil uji F disajikan dalam table 3 dan hasil perhitungan R Square di sajikan dalam table 4.

Jika di tinjau berdasar kan komponen transparansi keuangan , ternyata terdapat satu komponen yaitu transparansi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan anggaran yang tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Hasil uji untuk mengetahui pengaruh masing masing komponen transparansi keuangan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat disajikan dalam table 5.

**TABLE 3** | Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	69.857	3	23.286	73.886	.000b
	Residual	24.582	78	.315		
	Total	94.439	81			

a. Dependent Variable: Y  
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

**TABLE 4** | Perhitungan R Square

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860a	.740	.730	.561

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

**TABLE 5** | Hasil uji untuk mengetahui pengaruh masing masing komponen transparansi keuangan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat disajikan

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
			Std. Error			
1	(Constant)	-.124	.280		-.445	.658
	X1	-.082	.047	-.252	-1.729	.088
	X2	.170	.036	.467	4.744	.000
	X3	.289	.045	.723	6.359	.000

a. Dependent Variable: Y

## Pembahasan

Berdasarkan analisis data secara deskriptif menunjukkan bahwa e government kota Bandung telah mampu menyediakan informasi yang transparan dalam hal kebijakan pemerintah di bidang keuangan, penyusunan dan penggunaan anggaran. E government kota Bandung terdapat pada laman bandung.go.id. Dalam laman tersebut di tampilkan transparansi pengelolaan anggaran yang merupakan penjabaran dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).. Pada bagian tersebut juga terdapat kebijakan yang berkaitan dengan APBD, bagaimana proses penyusunan anggaran dan hasil penggunaan anggaran. Analisi deskriptif juga menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah.

Adanya tranparansi dalam pengelolaan anggaran menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi berkaitan dengan proses penyusunan anggaran dan penggunaan anggaran memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemeritnah dapat mengelola asetnya secara efisien dan tidak terdapat penyimpangan dari yang telah di rencanakan, karena didukung oleh pegawai yang kompeten dan produktif. Masyarakat juga percaya dengan pengelolaan aset yang efisien, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Moon (2003), Tolbert dan Mossberger (2006)

Tranparansi mengenai kebijakan penyusunan anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan masyarakat tidak begitu memperhatikan kebijakan yang ada dalam pemerintahan, ada tidaknya kebijakan tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat timbul dari hasil kinerja pemerintah yang jujur dan dapat diandalkan sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.Masyarakat lebih memperhatikan hasil kerja pemerintah dengan memperhatikan penyimpangan antara aggaran dan realisasinya.

## KESIMPULAN

Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang dipilih oleh rakyat menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk



mengatasinya maka pemerintah membangun suatu sistem yang berbasis teknologi informasi yang di namakan e government. Tujuan dari pembangunan e government adalah untuk menyajikan informasi yang transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui aktivitas yang di lakukan oleh pemerintah, sehingga korupsi dapat dihilangkan yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah transparansi keuangan dalam e government berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi keuangan yang di mulai dari kebijakan, penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, hanya masyarakat tidak begitu memperhatikan kebijakan mengenai anggaran. Ada atau tidaknya kebijakan tidak mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Masyarakat lebih memperhatikan hasil kerja pemerintah bukan kebijakannya.

## REFERENSI

Grimmelikhuijsen, S. G., & Welch, E. W., 2012. Developing and testing a theoretical framework for computer-mediated transparency of local governments. *Public Administration Review*, 72(4), 562- 571.

Irawan Dhani , 2018, Sejak KPK Berdiri, Ada 220 Wakil Rakyat Korup Dijerat, Detik News <https://news.detik.com/berita/d-4216860/sejak-kpk-berdiri-ada-220-wakil-rakyat-korup-dijerat>

Moon, M.J. Can IT help government to restore public trust? Declining public trust and potential prospects of IT in the public sector, 2003 . In Proceedings of the 36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, HI, USA, 6–9 January 2003.

OECD, 2019. Trust in Government. <https://www.oecd.org/gov/trust-in-government.htm>

Park, H. and Blenkinsopp, J., 2011 'The roles of transparency and trust in the relationship between corruption and citizen satisfaction', *International Review of Administrative Sciences*, 77 (2), pp.254-274.

Simbolon ,Christian Dior, 2019, Transparansi Menekan Korupsi. *Media Indonesia .com*.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/136554-transparansi-menekan-korupsi>

The World Bank, 2018. Combating Corruption

<https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption>

Tolbert, C.J.; Mossberger, K, 2006. The effects of e-government on trust and confidence in government. *Public Adm. Rev*, 66, 354–369.

United Nation, 2019. E Governemnt.

<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/UNeGovDD-Framework>

Wijaya Callistasia, 2019, Korupsi aktor politik 'masih parah', Indonesia setara dengan Swaziland, *BBC News Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47052551>

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2019 and . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License

(CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.